



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 325 Tahun 2022, perlu Menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

Krispus Kambuaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2023

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
TAHUN 2023**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I PEMBANGUNAN UNIT KERJA UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT MENUJU WBK/WBBMKPU																		
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja/Kelompok Kerja Zi tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Papua	SK Tim Kerja Zi / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah; dan Prosedur pemilihan Tim Kerja Zi	✓													
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zi telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan Zi, mensosialisasikan ke seluruh pegawai Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KPU Provinsi Papua ke seluruh pegawai dan melalui website	✓													TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester / per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau Per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	v		v		v		v		v		v		v		
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari sepedi pegawai lain	Daftar hadir, Baner Budaya Kerja 5 R	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan	SK Tim Agen Perubahan	v														
II PENATAAN TATA LAKSANA																			
1	Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dsn dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; 2) SOP tersedia di ruang pelayanan; 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	1) Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Provinsi Jawa Tengah 2) Screenshoot foto ketersediaan SOP 3) Laporan rapat evaluasi SOP							v								
2	E-Office Pemanfaatan aplikasi presensi	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	Aplikasi presensi berbasis aplikasi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan	Aplikasi JDIH, PPID, RPP KPU Provinsi Papua, website KPU Provinsi Papua, media sosial KPU Papua	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT						v								v	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Pemanfaalan IT telah dilakukan secara berkala																	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peralihan perundang-undangan	1) KPU Provinsi Papua menerapkan keterbukaan informasi publik 2) KPU Provinsi Papua menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara online melalui e-PPID. Diagamiagam penghargaan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA	
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Provinsi Papua	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi													v		
III	Penataan Sistem Manajemen SDM																		
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat Usulan Kebutuhan Pegawai						v								TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun	Penempatan Formasi CPNS, atau ada dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai	SK Penempatan. Pengumuman CPNS					v										

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1		yang telah disusun per jabatan	baru/dokumen usulan ke Sekjen KPU RI															TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan 2019 pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah diberikan	Penempalan Formasa CPNS, atau ada dokumen terkait proses rotasi, atau upaya pengajuan pegawai baru/dokumen usulan ke Sekien KPU RI	Dokumen SKP CPNS dan laporan Tahunan OS	✓													
		Menetapkan pola rotasi internal	Melaksanakan rotasi internal	SK Mutasi	✓													
2	Pola Mutasi Internal	Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanakan pola rotasi	SK Promosi/Rotasi Jabatan	✓													TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	1) Melakukan monitoring dan evaluasi oleh Baperjakat 2) Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Laporan monitoring efektifitas penempatan pegawai	✓													
		Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi	Analisa kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Usulan diklat/Bimtek dari KPU Provinsi Papua ke Bagian Diklat					✓									
3	Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	Penyusunan rencana	Rapat pembahasan kebutuhan	Usulan Diklat/Bimtek dari					✓									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Pendidikan dan pelatihan pegawai	KPU Provinsi Papua ke bagian diklat	✓												TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
		Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai, assessment pegawai	Prosentase Analisa dari kebuluhan, kecukupan kompelensi pegawai dengan kondisi raiil pegawai yang tersedia dan lampiran analisis mutase pegawai		✓											
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti		✓											
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau monitoring dll. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal, mengadakan Bimtek Melakukan moyen terhadap kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Usulan diklaVbimtek dari KPU Provinsi Papua ke Bagian Diklat Formulir monitoring efeklifitas pendidikan dan pelatihan		✓											

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1 6	2 7	3 8	4 9	5 10	6 11	7 12	8 13	9 14	10 15	11 16	12 17		
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon II tahun 2023 dan SKP Eselon II, III dan IV tahun 2022; SKP tahun 2022; renstra 2020- 2024	PK Eselon II tahun 2023 dan SKP Eselon II, III dan IV tahun 2022; SKP tahun 2022; renstra 2020- 2024	✓												TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian PK Eselon II tahun 2023 dan SKP Eselon II, III dan IV tahun 2022	Hasil pengukuran kinerja semester	✓													
		Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Satyalancana; penetapan pegawai teladan	✓													
		Hasil penilaian kinerja individu telah diadakan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karar individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas		✓													
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai. menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	✓													
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
IV Penguatan Akuntabilitas																		
1.	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Provinsi Papua memberikan pengarahan dan penandatanganan RKKL 2023	RKKL 2023	✓													TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPLI, dan Dokumen	✓													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	LAKIP KPU Provinsi Papua	v													TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	v													
		Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Provinsi Papua	v													
		dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	v													
		Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	v													
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2022	LAKIP KPU Provinsi Papua tahun 2022 tepat waktu	v													
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2022	LAKIP KPU Provinsi Papua tahun 2022 tepat waktu	v													
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP 2022	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP 2022	v												v	
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja																

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menyusun Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP	Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP														
V	Penguatan Pengawasan																	
1	Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariatan KPU Provinsi Papua	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	v													TIM PENGAWASAN
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Papua	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	v													
2	Penerapan SPIP	Pengendalian Internal Kartu Kendali SPIP telah dibangun di lingkungan KPU Provinsi Papua	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Provinsi Papua	Kartu Kendali SPIP	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian rasiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko stas pelaksanaan kebijakan	v													
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	v													
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapal, Undangan, Daftar Hadir, dan Nolulensi	v													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Provinsi Papua	Banner Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat dan Publikasi Media Sosial		v												TIM PENGAWASAN
		Hasilpenanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan						v								
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitorang dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi						v								
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuli rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat						v								
4	Whistle Blowing System	Whistle Blowing System sudah diimplementasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistle Blowing System, serta sosialisasi tataa cara penyampaian WBS di KPU Provinsi Papua dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat	Banner Saluran Penyampaian WBS		v												
		Whistle Blowing System telah diterapkan	Implementasi Whistle Blowing System	Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten/Kota						v								
		Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System sudah dilakukan	KPU Provinsi Papua berkoordinasi dengan Inspektor KPU meminta untuk dilakukan evaluasi	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan			v			v			v			v		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			atas implementasi WBS pada KPU Provinsi Papua														
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Hasil evaluasi atas penerapan whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS						v							
		Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Provinsi Papua berkoordinasi dengan Inspektorat	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	v												
		Hasil evaluasi atas penerapan whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS		v											
		Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Tim ZI KPU Provinsi Papua melakukan Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi Benturan Kepentingan pada KPU Provinsi Papua		v											
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)		v											
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Provinsi Papua	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan		v			v								
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah dilindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan		v			v								

TIM PENGAWASAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																		
1	Standar Pelayanan	Standar Pelayanan	Menyusun standar pelayanan public	Standar layanan PPID dan RPP	✓													TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
		Standar pelayanan telah dimaklumatkan	Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	✓													
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	✓													
		Dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan kaji ulang dokumen	Perbaikan SOP			✓											
2	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui arahan Ketua pada rapat	Daftar hadir notulen dokumen terkait			✓											
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Halaman Website KPU dan Media Sosial		✓												
		Telah terdapat sistem punishment (<i>sanksi</i>)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam Penghargaan			✓											
		Telah terdapat sarana layanan terpadu terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan helpdesk	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku lalu helpdesk			✓											
		Terdapat inovasi pelayanan	Membuat halaman Hoax Pemilu pada website KPU untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan	halaman Hoax Pemilu pada website e-PPID, media sosial KPU Provinsi Papua			✓											

v

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Helpdesk dan PPID	halaman Hoax Pemilu pada website e-PPID, media sosial KPU Provinsi Papua				✓										TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
		Hasil survey kepuasan maSyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Hasil Survey				✓										
		Dilakukan lindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Screenshot dari Website				✓										
				Analisis survey kepuasan masyarakat dan tindak lanjut														

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

Krispus Kambuaya

